

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA
PILKADA SERENTAK
(Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara)**

Oleh: La Ode Suprianto, Muh. Arsyad, dan Megawati A. Tawulo

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap politik uang (*money politic*) pada pemilihan kepala daerah serentak; dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pemilihan kepala daerah serentak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik kuesioner, dan teknik wawancara dan selanjutnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Ronta menyatakan tidak setuju dengan adanya politik uang pada pemilihan kepala daerah serentak. Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya politik uang akan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Buton Utara khususnya Desa Bonegunu. Sedangkan bagi masyarakat yang menyatakan setuju dengan adanya politik uang dengan alasan ekonomi yaitu pemberian calon kepala daerah dalam bentuk uang sedikitnya dapat membantu beban kebutuhan sebagian warga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang terdiri atas beberapa faktor yaitu: (1) faktor internal berhubungan dengan sistem yaitu kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan adanya politik uang, nilai yang berhubungan dengan kegunaan adanya politik uang terhadap kehidupan masyarakat Desa Ronta, tujuan berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap tujuan adanya politik uang tersebut, (2) faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Politik Uang.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik demokratik modern. Pemilihan bahkan telah menjadi salah satu parameter utama oleh masyarakat internasional untuk melihat tidak demokratisnya suatu negara. Walau pada saat yang lain, pemilihan umum seringkali dilakukan hanya untuk melegitimasi tindakan nyata rezim yang otokratik. Karena dalam kenyataannya, masyarakat internasional kini hampir menyepakati bahwa tidak ada satupun negara yang dikategorikan sebagai negara demokratis apabila tidak menyelenggarakan pemilu, terlepas dari kualitas pelaksanaannya. Pemilu juga dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil, sehingga pemimpin yang

dihasilkan benar-benar menjadi pemimpin yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat.

Dewasa ini rakyat kenyataannya memiliki kedaulatan yang utuh, sebab secara langsung masyarakat telah terlibat dalam menentukan pemimpin mereka, baik yang duduk di legislatif maupun di eksekutif. Implementasi proses politik tersebut adalah diharapkan terjadinya peningkatan akuntabilitas secara timbal balik. Pada saat ini, bangsa Indonesia telah tiga kali melakukan pemilihan umum secara langsung. Sehingga dalam proses pelaksanaan banyak ditemukan kecurangan-kecurangan seperti *money politics* pada pemilihan kepala daerah ataupun pemilu legislatif.

Salah satu tantangan dalam pemilu adalah maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum. Dwipayana (2009) menyebutkan bahwa politik uang adalah salah satu faktor penyebab Demokrasi berbiaya tinggi. Kumorotomo (2009) menyatakan bahwa setiap orang tau bahwa kasus-kasus politik uang merupakan hal yang jamak dalam pemilu setelah reformasi. Adapun semua jika ditanya akan selalu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik uang, warga segera bisa menunjuk bagaimana para calon itu menggunakan uang untuk “membeli suara” di daerah pemilihan mereka. Menurut Dhakidae (2011) politik uang merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan *votes* (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas yang akan dijual pada saat sudah diperoleh. Dibeli pada saat pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik.

Dalam momen seperti saat ini, uang merupakan alat kampanye yang sangat ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon kepala daerah tertentu. Kecerdasan intelektual dan kesalehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan bagi calon kepala daerah, tetapi kekayaan finansial yang menjadi penentu kemenangan dalam pemilu. Praktik *money politic* tumbuh subur di setiap daerah yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya adanya *money politic* di pemilihan kepala daerah tersebut. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa *money politic* secara normatif harus dihindari. Segalanya berjalan dengan wajar. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi *money politic*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun terkadang tidak ada protes.

Budaya *money politic* merupakan hal lumrah dalam masyarakat. Fenomena dalam *money politic* dalam masyarakat bisa dilihat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah sebagai komponen dari pemerintahan Indonesia. Proses pencalonan kepala daerah seringkali melakukan *money politic* untuk mendapatkan hak pilih masyarakat untuk memenangkan pemilihan tersebut.

Dalam skala yang lebih luas, praktik *money politic* telah melibatkan hampir seluruh elemen masyarakat seperti pejabat, politisi, akademisi, pendidik, saudagar, bahkan kalangan agamawan sekalipun. Dalam persepsi sosiologi politik, fenomena bantuan politis ini dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa

terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (*reciprocity*). Dengan kata lain, relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang. Perilaku *money politic*, dalam konteks politik sekarang, seringkali di atasnamakan sebagai bantuan dan lain-lain.

Pergeseran istilah *money politics* ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (*political behaviour*) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan (Awal Rahmat, 2015).

Kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa agamawan menyatakan bahwa *money politics* itu haram, penilaian beberapa agamawan yang lain tidak seekstrem itu. Menteri Agama Malik Fadjar, seperti yang dikutip oleh Ismawan dalam *money politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktik *money politics* haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini (Ismawan, 1999:2).

Akhirnya, sulit di bedakan antara pemberian yang tergolong risiwah (suap) dan pemberian yang tergolong amal jariyah. Ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktik *money politic*. Melihat kenyataan bahwa praktik *money politic* telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas, maka persoalan yang pelik ini harus disikapi dengan serius. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya *money politic* membuat politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampilkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang fair. Pemilu seperti ini akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, masyarakat tetap tidak bisa memberikan justifikasi hukum terhadap semua pemberian politis sebagai risiwah. Karena ketetapan hukum atas pemberian politis ini harus melalui proses interpretasi berupa upaya pemahaman secara mendalam terhadap makna kepentingan yang sesungguhnya dibalik perilaku politik (*political behaviour*) terlebih dahulu, sehingga publik dapat mengetahui alasan yang mendasari suatu tindakan atau bantuan tersebut.

Sistem pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara langsung di laksanakan pada 9 Desember 2015 yang lalu membuka maraknya praktik *money politic* di Desa Ronta, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara. Berangkat dari pemikiran inilah peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai tema diatas dengan mengambil lokasi di Desa Ronta, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap politik uang (*money politic*) di Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Desa Ronta, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara serta untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang dalam Pilkada Serentak di Desa Ronta, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 220 orang dengan jumlah sampel sebanyak 66 orang. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik kuesioner, dan teknik wawancara (interview) serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Politik uang merupakan semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau dengan menjanjikan uang atau meteri lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadi perbuatan politik uang (*money politic*) yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini. Seperti yang terjadi di Kabupaten Buton Utara khususnya Desa Ronta pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di beberapa daerah di Indonesia. Praktik politik uang benar-benar sudah menjadi lumrah diberbagai kalangan di masyarakat. Berikut informasi tentang respon masyarakat terhadap politik uang yang terjadi di Desa Ronta pada pemilihan kepala daerah.

Tabel 1. Tanggapan Responden Terhadap Politik Uang

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sudah tahu	66	100
2	Belum tahu	-	-
Total		66	100

Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).

Dari 66 responden yang diberikan kuesioner, semua menjawab sudah tahu akan adanya politik uang dalam perhelatan demokrasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton Utara khususnya di Desa Ronta. Hal ini disebabkan karena pelaku-pelaku politik uang dalam artian sekelompok orang yang memberikan politik uang itu terkadang dilakukan dengan terang-terangan sehingga masyarakat dengan

mudah dapat mengetahui akan adanya praktik politik uang dalam pilkada yang dilangsungkan di desa Ronta.

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Kesetujuan Adanya Politik Uang

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	12	18,18
2	Kurang setuju	-	-
3	Tidak setuju	54	81,82
Total		66	100,00

Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).

Berdasarkan data pada tabel di atas tentang adanya tanggapan responden mengenai adanya politik uang menunjukkan bahwa persentase sebaran jawaban responden, dimana 12 responden (18,18%) menyatakan bahwa mereka setuju dengan praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buton Utara khususnya di Desa Ronta, dan 54 responden (81,82 %) menyatakan tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Ronta dalam memilih kepala daerah masih menggunakan idealismenya dan tidak terpengaruh dengan adanya politik uang.

Memberikan suara adalah salah satu tindakan sosial dalam proses pemilihan Kepala Daerah, di mana pemilihan banyak menggunakan pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan putusan mereka. Ada dua bentuk proses memberikan suara dalam pemilihan, Segmen pemilih rasional, yaitu kelompok pemilih yang berfokuskan perhatiannya pada faktor isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan pilihan politiknya serta Segmen pemilih emosional, yaitu kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu seperti kesedihan, kekhawatiran, dan kegembiraan terhadap harapan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya. Faktor emosioanl ini sangat ditentukan oleh personalitas kandidat.

Hal tersebut diatas sebagaimana terjadi di Kabupaten Buton Utara yang telah melakukan proses pemilihan kepala daerah khususnya di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu. Dalam proses pemilihan tersebut terdapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan adanya politik uang (*money politic*). Melalui *money politics* dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu.

Masyarakat yang menyatakan setuju dengan adanya politik uang adalah segelintir orang yang tinggalnya di pelosok desa yang memungkinkan kurangnya informasi yang diperoleh tentang politik uang (*money politic*) sehingga bagi mereka pemberian itu wajar dan mereka juga tidak pernah memintanya. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya politik uang tersebut adalah masyarakat yang sudah tentu memahami dan memaknai arti dari politik uang itu sendiri, bahwa setelah terpilih nantinya semua uang yang telah dikeluarkan akan dikembalikan dengan menjual program-program pemerintah yang mestinya program itu untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.

Dari sebaran kuesioner tentang politik uang dengan kesesuaian kebutuhan masyarakat menghasilkan dua persepsi yang berbeda yaitu sesuai dengan tidak sesuai. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Tanggapan Responden tentang Politik Uang Dengan Kesesuaian Kebutuhan Masyarakat Desa Ronta Saat Ini

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	12	18,18
2	Sesuai	-	-
3	Tidak Sesuai	54	81,82
Total		66	100,00

Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).

Berdasarkan hasil olahan data kuesioner data di atas, tanggapan responden tentang permasalahan politik uang dengan kesesuaian kebutuhan masyarakat yaitu, 12 responden (18,18%) menyatakan sangat sesuai, 54 responden (81,82%) menyatakan tidak sesuai. Pernyataan masyarakat sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini berasal dari mereka yang berada pada kelas ekonomi rendah, bagi mereka dengan adanya politik uang tersebut sedikit membantu mengurangi beban ekonomi keluarga utamanya berkaitan dengan finansial. Selain itu, ada kebutuhan lain yang dapat dipenuhi dengan adanya pemberian dari salah satu calon kepala daerah yang akan berkompetensi di Buton Utara khususnya Desa Ronta Sedangkan tanggapan masyarakat yang menyatakan tidak sesuai adalah bagi masyarakat yang berada pada kelas ekonomi sedang dan atas. Tentu seberapa besar dan dalam bentuk apapun pemberian kandidat atau calon kepala daerah tidak mempengaruhi pola pikir masyarakat yang berada pada kelas ini. Pemikiran sederhana yang mendasari masyarakat ini adalah perkembangan dan pembangunan daerah Buton Utara bukan berdasar atas ekonomi semata yang akan memberikan pengaruh sebentar saja.

Politik uang (*money politic*), kehadirannya dalam lingkungan masyarakat pada saat-saat tertentu sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4. Tanggapan Responden tentang Kegunaan Politik Uang Untuk Masyarakat Desa Ronta

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat berguna	12	18,18
2	Berguna	-	-
3	Tidak Berguna	54	81,82
Total		66	100,00

Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).

Berdasarkan olahan data kuesioner di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak menerima dengan baik adanya politik uang, hal ini dapat dilihat pada tabel di atas, yang mana sebagian besar responden menyatakan politik uang (*money politic*) tidak berguna untuk masyarakat Desa Ronta kedepanya yaitu sebanyak 54 responden (81,82%). Mayoritas masyarakat yang mengatakan bahwa politik uang

tidak berguna bagi masyarakat dengan melihat dan berpikir untuk kemajuan daerah. Masyarakat ini melihat dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas individu calon bukan berdasar pada kekuatan finansial calon, juga mereka yang mengatakan bahwa politik uang tidak berguna adalah masyarakat yang telah memahami dan memaknai makna politik uang dengan mempelajari sejarah masa lalu terkait dengan politik uang. Sedangkan masyarakat yang menyatakan sangat berguna adalah masyarakat yang berada pada kelas ekonomi lemah yang sejak awal menyatakan setuju dengan adanya politik uang.

Dari hasil sebaran kuesioner peneliti dengan pertanyaan apakah masyarakat mengetahui tujuan adanya politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 12 responden (18,18%) menyatakan tidak mengetahui sedangkan 54 (81,82%) menyatakan mengetahui adanya politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Tanggapan Responden tentang tujuan Adanya Politik Uang pada Pilkada Serentak

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	54	81,82
2	Tidak mengetahui	12	18,18
Total		66	100,00

Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).

Olahan data sebaran kuesioner di atas menunjukkan bahwa 54 responden (81,82%) menyatakan mengetahui tujuan adanya politik uang (*money politic*) itu sendiri sementara 12 responden (18,18%) menyatakan tidak mengetahui tujuan adanya politik uang. Masyarakat yang menyatakan mengetahui tujuan adanya politik uang (*money politic*) dalam pemilihan kepala daerah itu mayoritas adalah masyarakat yang tidak setuju dengan politik uang itu sendiri bagi mereka hal demikian itu adalah cara bagi calon penguasa untuk merebut kursi pemimpin dengan menghalalkan segala cara sedangkan masyarakat yang menyatakan tidak mengetahui tujuan adanya politik uang adalah sebagian masyarakat yang setuju dengan adanya hal itu.

Lingkungan berpengaruh terhadap cara pandang atau persepsi seseorang dalam mempersepsikan suatu obyek. Dari sebaran kuesioner kepada responden terkait dengan pengaruh adanya politik uang terhadap lingkungan Desa Ronta didapatkan masyarakat yang mengatakan akan mempengaruhi lingkungan utamanya akan terjadinya konflik internal desa dalam hal ini biasanya terjadi pada tataran keluarga yang tidak memiliki kesamaan persepsi dalam menentukan pilihannya. Untuk lebih jelas terkait dengan tanggapan masyarakat terhadap pengaruh adanya politik uang pada lingkungan Desa Ronta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Tanggapan Responden tentang Pengaruh Adanya Politik Uang terhadap Lingkungan Desa Ronta

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat berpengaruh	54	81,82
2	Kurang berpengaruh	12	18,18
3	Tidak berpengaruh	-	-
Total		66	100,00

Sumber: Data Kuesioner (diolah, 2016).

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dari 66 responden terdapat 54 responden (81,82%) mengatakan sangat berpengaruh dan 12 responden (18,18%) mengatakan kurang berpengaruh. Responden yang mengatakan sangat berpengaruh dengan beranggapan bahwa dengan adanya politik uang akan mengundang konflik dalam lingkungan Desa Ronta. Konflik ini terjadi ketika ada sebagian masyarakat yang tidak sependapat dengan adanya politik uang dan sebagian masyarakat sependapat dengan hal itu, perbedaan pendapat inilah yang kemudian menyebar menjadi benih-benih konflik bahkan sampai meramba pada lingkungan keluarga.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan persepsi masyarakat terhadap adanya politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Desa Ronta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Ronta Kecamatan Bonegunu secara umum telah mengetahui akan adanya politik uang (*money politic*) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Desa Ronta, adapun informasi terkait dengan hal tersebut diperoleh dari berbagai sumber yakni media masa dan informasi dari teman atau tetangga. Masyarakat Desa Ronta Kecamatan Bonegunu menganggap bahwa dengan adanya politik uang akan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Buton Utara khususnya Desa Bonegunu karena pasangan calon yang menggunakan politik uang sebagai alat untuk mendulang suara ketika dinyatakan menang dan menduduki pucuk pimpinan di daerah maka yang akan dipikirkan terlebih dahulu adalah bagaimana dan darimana sumber pengembalian utang yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan berlangsung. Sehingga secara umum masyarakat Desa Ronta Kecamatan Bonegunu tidak menerima dengan baik adanya politik uang tersebut dan tidak setuju dengan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh siapapun yang akan menjadi kepala daerah.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang (*money politic*) terdiri atas beberapa faktor yaitu: (1) faktor internal berhubungan dengan sistem yaitu kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan adanya politik uang, nilai yang berhubungan dengan kegunaan adanya

politik uang terhadap kehidupan masyarakat Desa Ronta, tujuan berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap tujuan adanya politik uang tersebut, (2) faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan di sini, antara lain:

1. Masyarakat Desa Ronta dalam menghadapi pemilihan kepala daerah seharusnya terlebih dahulu mengedepankan rasionalitas bukan memandang dan menentukan pilihan berdasarkan nilai materi. Melakukannya cukup sederhana hanya dengan mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku seputaran pemilihan umum. Dengan demikian harapan pemerintah serta penyelenggara pemilihan dapat terpenuhi yakni terwujudnya pemilihan jujur, adil, bebas dan rahasia.
2. Pemerintah seharusnya mengadakan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat terkait dengan dampak adanya politik uang (*money politic*) agar mereka lebih memahami tujuan dilakukannya hal demikian itu.

DAFTAR PUSTAKA

- AAGN Ari Dwipayana. 2009. *Demokrasi Biaya Tinggi*. Yogyakarta: Jurnal Fisipol UGM.
- Budiarjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daniel Dakhidae. 2011. *Melawan Politik Kartel Dalam Demokrasi Indonesia*. Makalah Ilmiah, Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Indra ismawan. 1999. *Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Mulgan Geoff. 1994. *Politik Dalam Sebuah Era Anti-Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ode Tua Sastrawan. 2010. *Faktor-faktor Penyebab Kemenangan Partai Demokrat Pada Pemilihan Umum*. Kendari: Skripsi FISIP UHO.
- Rahmat Awal. 2015. *Money Politic dalam Pemilu Legislatif*. Kendari: Skripsi FISIP UHO.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1983. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Silondae Kunsardianto. 2015. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Dana Sehat Sebagai Imlementasi Dari Program Desa/Kelurahan Siaga Aktif*. Kendari: Skripsi FISIP UHO.
- Suharsin, Arikunto. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Upe, Ambo. 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Upe, Ambo dan Damsid. 2010. *Asas-asas Multiple Reserches*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Wahyudi, Kumorotomo. 2009. *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi*. Makalah ilmiah: UNDIP

Walgito, B. 2000. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi.